

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025 (*Audited*)**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Denpasar, 26 Januari 2026
Kepala Balai



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291999031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran. (b) Neraca. (c) Laporan Operasional. (d) Laporan Perubahan Ekuitas. dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 26 Januari 2026
Kepala Balai.



Dr. Irh. I Made Rai Yasa. MP
NIP 197309291999031001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vii
Daftar Tabel	ix
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Rekapitulasi Bukti Setor Pendapatan Per Desember 2025
Monitoring Kelebihan Tunjangan Fungsional (Perubahan Fungsional Peneliti Menjadi Fungsional Lainnya)
Eks Peneliti Yang Tetap Di Kementan Satker BRMP Bali
Rincian Belanja Barang Per Akun Detail Satker Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Per 30
Desember 2025
Neraca Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Neraca Percobaan Akrual Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Neraca Percobaan Kas Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Rekon Internal GLP Dan Aset
LPJ Penerimaan Desember Tahun 2025
LPJ Pengeluaran Desember Tahun 2025
Laporan Persediaan Satker
Laporan Operasional Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
Penetapan Tahun Penetapan Piutang PNB
Laporan Perubahan Ekuitas Satuan Kerja BRMP Bali Semester 2 Tahun Anggaran 2025
CHR BRMP Bali
Isian Capaian Output Desember 2025
Nilai IKPA Desember 2025
Hasil Rekonsiliasi Sakti - Span Pada Satker 633982 Sampai Dengan Periode 2025-12
Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi PNBPN TA 2025	26
Tabel B.1.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPN TA 2025 dan 2024	27
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	27
Tabel B.2.2	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	28
Tabel B.2.1.1.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	28
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025	29
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan	30
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	31
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	32
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	32
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025	33
Tabel C.1.2	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.	33
Tabel C.2.1	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.	34
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel C.4.1	Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel C.5.1	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	35
Tabel C.6.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel C.7.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	37
Tabel C.8.1	Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024	37
Tabel C.9.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	38
Tabel C.9.2	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024	38
Tabel C.10.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	38
Tabel C.10.2	Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel C.11.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan. Irigasi dan Jaringan	39
Tabel C.11.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel C.12.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	40
Tabel C.12.2	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel C.14.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel C.15.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel C.17.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	42
Tabel C.4	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel C.18.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	44
Tabel D.1.1	Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	44

Tabel D.1.2	Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	45
Tabel D.2.1.2	Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Tahun 2025 di LRA dengan LO	45
Tabel D.2.1	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	46
Tabel D.2.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	47
Tabel D.3.1	Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	47
Tabel D.3.2	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	48
Tabel D.3.3	Rincian Selisih dari Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	48
Tabel D.4.1	Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	48
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO	49
Tabel D.5.1	Perbandingan Realisasi Belanja/Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	50
Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	50
Tabel D.5.3	Rincian Selisih dari Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	50
Tabel D.6.1	Perbandingan Realisasi Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	51
Tabel D.6.2	Perbandingan Realisasi Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 LRA dan LO	51
Tabel D.7.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	51
Tabel D.8.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025	52
Tabel D.9.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024	52
Tabel E.4.1	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025	53



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp189.240.950 atau mencapai 470,75% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp40.200.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.336.341.277 atau mencapai 93,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.942.433.000.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Laporan Realisasi Anggaran Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah tetap.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp175.879.863.823 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp175.841.468.239 dan Aset Lainnya sebesar Rp38.395.584

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp175.879.863.823.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Neraca Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah tetap.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.515.950 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.250.436.386 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.207.920.436. Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 185.000 dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0 dan Defisit Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.207.735.436.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Laporan Operasional Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah tetap.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp176.936.705.832 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.207.735.436 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.150.893.427 dan Penurunan Ekuitas sebesar Rp-1.056.842.009 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp175.879.863.823.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Laporan Perubahan Ekuitas Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah tetap.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	0	0	0	0
Pendapatan BLU		0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.	40.200.000	189.240.950	470,75	104.939.830
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		40.200.000	189.240.950	470,75	104.939.830
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	5.674.875.000	5.616.812.940	98,98	5.786.847.904
Belanja Barang	B.2.2	3.267.558.000	2.719.528.337	83,23	3.038.792.932
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		8.942.433.000	8.336.341.277	93,22	8.825.640.836

Denpasar, 26 Januari 2026
Kepala Balai.



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291999031101



NERACA

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.6	0	146.540.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0	-732.700
Persediaan	C.7	0	247.707.000
JUMLAH ASET LANCAR		0	393.514.300
ASET TETAP			
Tanah	C.8	162.802.640.000	162.802.640.000
Peralatan dan Mesin	C.9	8.454.553.208	8.454.553.208
Gedung dan Bangunan	C.10	15.406.532.329	15.395.612.329
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.11	1.003.550.000	1.003.550.000
Aset Tetap Lainnya	C.12	112.190.100	112.190.100
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.14	-11.937.997.398	-11.272.064.244
JUMLAH ASET TETAP		175.841.468.239	176.496.481.393
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.15	0	0
Aset Lain-lain	C.16	104.618.000	115.538.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.17	-66.222.416	-68.827.861
JUMLAH ASET LAINNYA		38.395.584	46.710.139
JUMLAH ASET		175.879.863.823	176.936.705.832
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.19	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0

Uraian	Catatan	2025	2024
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	175.879.863.823	176.936.705.832
JUMLAH EKUITAS		175.879.863.823	176.936.705.832
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		175.879.863.823	176.936.705.832

Denpasar, 26 Januari 2026
Kepala Balai.



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291990031001



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)					
URAIAN	Catatan	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL		0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL		0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan		0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0	0	
Pendapatan Cukai		0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya		0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk		0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar		0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)		0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	42.515.950	39.889.800	2.626.150	6,584
Pendapatan Badan Layanan Umum		0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		42.515.950	39.889.800	2.626.150	6,584

URAIAN	Catatan	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
PENDAPATAN HIBAH		0	0	0	
Pendapatan Hibah		0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0	0	
Jumlah Pendapatan		42.515.950	39.889.800	2.626.150	6,584
BEBAN OPERASIONAL		0	0	0	
Beban Pegawai	D.2	5.616.812.940	5.786.847.904	(170.034.964)	(2,934)
Beban Persediaan	D.3	246.232.540	400.474.325	(154.241.785)	(38,515)
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.426.319.525	1.530.312.121	(103.992.596)	(6,796)
Beban Pemeliharaan	D.5	776.744.109	555.766.721	220.977.388	39,761
Beban Perjalanan Dinas	D.6	517.939.163	532.529.765	(14.590.602)	(2,74)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.7	3.793.100	0	3.793.100	
Beban Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	
Beban Subsidi		0	0	0	
Beban Hibah		0	0	0	
Beban Bantuan Sosial		0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	663.327.709	805.102.261	(141.774.552)	(17,610)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(732.700)	732.700	(1.465.400)	(200)
Beban Transfer ke Daerah		0	0	0	
Beban Lain-Lain		0	0	0	
JUMLAH BEBAN		9.250.436.386	9.611.765.797	(361.329.411)	(3,759)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.207.920.436)	(9.571.875.997)	363.955.561	(3,802)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		0	(43.666.874)	43.666.874	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset		0	0	0	
Beban Pelepasan Aset		0	43.666.874	(43.666.874)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	

URAIAN	Catatan	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		185.000	439.587.030	(439.402.030)	(99,958)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	185.000	439.587.030	(439.402.030)	(99,958)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		185.000	395.920.156	(395.735.156)	(99,958)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.207.735.436)	(9.175.955.841)	(31.779.595)	0,346
POS LUAR BIASA		0	0	0	
Beban Luar Biasa		0	0	0	
POS LUAR BIASA		0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO		(9.207.735.436)	(9.175.955.841)	(31.779.595)	0,346

Denpasar, 26 Januari 2026
Kepala Balai.



Dr. drh. I Made Rai Yasa. MP
NIP. 197209291999031001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	176.936.705.832	177.391.960.667
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(9.207.735.436)	(9.175.955.841)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.150.893.427	8.720.701.006
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	8.336.341.277	8.825.640.836
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.1	-189.240.950	-104.939.830
Transfer Keluar		0	0
Transfer Masuk		3.793.100	0
Pengesahan Hibah Langsung		0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)		(1.056.842.009)	(455.254.835)
EKUITAS AKHIR	E.5	175.879.863.823	176.936.705.832

Denpasar, 26 Januari 2026
Kepala Balai



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Tugas dan Fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali

Tugas BRMP Bali

Melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Fungsi BRMP Bali

- Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik Lokasi serta modernisasi pertanian.
- Pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik Lokasi serta model pertanian modern.
- Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian.
- Pelaksanaan pendampingan program Pembangunan pertanian.
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik Lokasi dan Standar Nasional Indonesia.
- Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik Lokasi serta modernisasi pertanian.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik Lokasi serta modernisasi pertanian.
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BRMP Bali Semester 2 Tahun 2025 (*Unaudited*) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BRMP Bali Semester II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO,

Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

3) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan

- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan

baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp189.240.950 atau mencapai 407,75% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp40.200.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	Pendapatan PNBPA Lainnya	0	0	0	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	40.200.000	42.515.950	105,76	104.939.830
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan Perlindungan Sosial Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	146.725.000	100	0
Jumlah		40.200.000	189.240.950	470,75	104.939.830

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPA Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp42.515.950. Penerimaan tersebut berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa rumah dinas dan guest house yang dikelola oleh satuan kerja. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan sewa oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan, dengan tarif dan jangka waktu pemanfaatan yang telah ditetapkan, serta telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendapatan Lain-lain pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp146.725.000 merupakan penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran sebelumnya (akun 425911). Penerimaan tersebut timbul dari kelebihan pembayaran tunjangan fungsional Peneliti kepada pegawai yang beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Seluruh penerimaan telah disetorkan ke Kas Negara dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 470,75% dibandingkan TA 2024. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali adalah sebagai berikut:

Tabel B.1.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPA TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	42.515.950	39.889.800	6,58
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	146.725.000	65.050.030	125,56

Tabel di atas menyajikan realisasi pendapatan berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berikut persentase perubahannya,

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp42.515.950, meningkat 6,58% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu terealisasi sebesar Rp146.725.000, meningkat 125,56% dibandingkan Tahun Anggaran 2024, yang berasal dari pengembalian belanja pegawai tahun-tahun sebelumnya.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp4.040.105.145 atau 45,87% dari anggaran belanja sebesar Rp8.807.177.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
Akun Belanja	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	.%
Belanja Pegawai	5.674.875.000	5.616.812.940	98,98
Belanja Barang	3.267.558.000	2.719.528.337	83,23
Belanja Modal	-	-	-

Total Belanja Kotor	8.942.433.000	8.336.341.277	93,22
Pengembalian Belanja	0	0	-
Total Belanja	8.942.433.000	8.336.341.277	93,22

Tabel B.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	.%
Belanja Pegawai	5.616.812.940	5.786.847.904	-2,94
Belanja Barang	2.719.528.337	3.038.792.932	-10,51
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja	8.336.341.277	8.825.640.836	-5,54

Tabel di atas menyajikan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 beserta persentase perubahannya.

- Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.616.812.940 mengalami penurunan 2,94% dibandingkan Tahun Anggaran 2024, Penurunan Belanja Pegawai terutama disebabkan oleh adanya pensiun pegawai.
- Belanja Barang terealisasi sebesar Rp2.719.528.337 atau menurun 10,51%. Penurunan belanja tersebut secara umum disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Secara keseluruhan, total belanja pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp8.336.341.277 atau menurun 5,54% dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Belanja Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.616.812.940 dan Rp5.786.847.904. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2,93% dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025, Penurunan Belanja Pegawai terutama disebabkan oleh adanya pensiun pegawai.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5.542.574.000	5.487.363.260	99,00	5.715.311.946
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	-
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	51.901.000	50.187.486	96,70	-
Belanja Lembur	80.400.000	80.275.000	99,84	75.453.000

Uraian	Anggaran 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	-	-	-	-
Jumlah	5.674.875.000	5.617.825.746	98,99	5.790.764.946
Pengembalian Belanja Pegawai	-	1.012.806	0	3.917.042
Jumlah Belanja	5.674.875.000	5.616.812.940	98,98	5.786.847.904

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Belanja Pegawai Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.719.528.337 dan Rp3.038.792.932. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester II TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	1.086.762.000	1.078.749.870	99,26	1.675.574.790
Belanja Barang Operasional	613.036.000	611.685.020	99,78	619.892.350
Belanja Barang Non Operasional	454.903.000	454.828.310	99,98	641.305.115
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	18.823.000	12.236.540	65,01	414.377.325
Belanja Jasa	376.055.000	359.806.195	95,68	269.114.656
Belanja Jasa	376.055.000	359.806.195	95,68	269.114.656
Belanja Pemeliharaan	763.171.000	763.033.109	99,98	561.573.721
Belanja Pemeliharaan	763.171.000	763.033.109	99,98	561.573.721
Belanja Perjalanan Dinas	1.041.570.000	517.939.163	49,73	532.529.765
Belanja Perjalanan DN	1.041.570.000	517.939.163	49,73	532.529.765
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	-
Belanja BLU	0	0	0	-
Belanja Barang BLU	0	0	0	-
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	-
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	-
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	-
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0	-
Jumlah	3.267.558.000	2.719.528.337	83,23	3.038.792.932

Dari realisasi belanja barang TA 2025 sebagaimana tabel diatas, Belanja barang mengalami penurunan sebesar 10,51% dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2025 kegiatan belum berjalan secara optimal serta adanya anggaran yang diblokir dikarenakan adanya

instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Belanja Barang			
Belanja Barang Operasional	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	18.823.000	12.236.540	65,01
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.823.000	12.236.540	65,01
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	21.076.000	21.063.150	99,94
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	21.076.000	21.063.150	99,94
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Belanja BLU	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi – BLU	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU	0	0	0
Jumlah	39.899.000	33.299.690	83,46

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Belanja Barang Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2025 dan TA. 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak memiliki anggaran untuk Belanja Modal.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak memilki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak memilki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi untuk belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Periode yang berakhir pada 31 Desember TA. 2025. Hal ini disebabkan karena Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi untuk belanja Modal Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Periode yang berakhir pada 31 Desember TA. 2025. Hal ini disebabkan karena Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki anggaran belanja Modal Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Belanja Modal Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp176.210.320.326 dan Rp176.936.705.832. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp726.385.506 atau 0,41%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	0	393.514.300
Aset Tetap	175.841.468.239	176.496.481.393
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	38.395.584	46.710.139
Jumlah	175.879.863.823	176.936.705.832

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp393.514.300. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp393.514.300 atau 100%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Penurunan saldo Aset Lancar disebabkan oleh telah dilakukannya pelunasan dan penyelesaian piutang sehingga tidak terdapat saldo Aset Lancar pada akhir periode pelaporan. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	146.540.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	-732.700
Persediaan	0	247.707.000
Jumlah	0	393.514.300

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Aset Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025(Rp)
Uang tunai	0
Uang di rekening BPG 037 BPSIP Bali	0
Jumlah	0
Selisih	0

Tabel C.1.2 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Uang tunai	0	0	0
Uang di rekening BPG 037 BPSIP Bali	0	0	0
Selisih karena kesulitan uang kecil	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang tunai pada Kas di bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan Uang di rekening BPG 037 BRMP Bali sebesar Rp0.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing -masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel C.2.1 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024(Rp)
Uang tunai	0	0
Uang di rekening BPG 037 BPSIP Bali	0	0
Jumlah	0	0
Selisih	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Total	0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1 Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0
Total	0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Total	0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp146.540.000. Piutang Bukan Pajak merupakan jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam pelayanan pengelola kekayaan negara dipisahkan pengelola barang milik negara pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.6.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	-	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	-	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	-	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	-	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	146.540.000	- 146.540.000
Jumlah			0	146.540.000	- 146.540.000

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar Rp146.540.000 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan piutang yang berasal dari belanja pegawai berupa kelebihan pembayaran tunjangan fungsional, sehubungan dengan peralihan jabatan fungsional Peneliti menjadi Analis Standardisasi Pertanian.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Piutang Bukan Pajak Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.7. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp247.707.000. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp247.000.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024.

Tabel C.7.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	227.997.000	-227.997.000
11	Persediaan Lainnya	0	19.710.000	-19.710.000
Total		0	247.707.000	-247.707.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persediaan berupa Barang Bahan baku lainnya tahun 2024 diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp227.997.000, dan persediaan lainnya sebesar Rp19.710.000. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi karena adanya transaksi keluar barang habis pakai.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Persediaan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp176.171.138.680 dan 176.496.481.393. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-325.342.713 atau 0,18% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Tanah	162.802.640.000	162.802.640.000	0
Peralatan dan Mesin	8.454.553.208	8.454.553.208	0
Gedung dan Bangunan	15.406.532.329	15.395.612.329	0
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.003.550.000	1.003.550.000	0
Aset Tetap Lainnya	112.190.100	112.190.100	0

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	-11.937.997.398	-11.272.064.244	-336.262.713
Jumlah	175.841.468.239	176.496.481.393	-336.262.713

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Aset Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.8. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp162.802.640.000 dan Rp162.802.640.000.

Tabel C.8.1 Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Tanah	162.802.640.000	162.802.640.000	0
Total	162.802.640.000	162.802.640.000	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Tanah Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.9. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.454.553.208 dan Rp8.454.553.208. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.9.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin (Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	8.454.553.208
Mutasi Kurang	
Penghentian penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	8.454.553.208
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	8.321.196.108
Nilai Buku per 31 Desember 2025	133.357.100

Tabel C.9.2 Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Peralatan dan Mesin	8.454.553.208	8.454.553.208	0
Total	8.454.553.208	8.454.553.208	0

Tidak terdapat mutasi kurang atau mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Tanah Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.10. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp15.406.532.329 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.395.612.329, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp10.920.000. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penggunaan kembali aset lainnya berupa paving blok yang direklasifikasikan menjadi bagian dari aset Gedung dan Bangunan. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.10.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan (Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15.395.612.329
Mutasi Tambah	
Penggunaan aset lain-lain	10.920.000
Saldo per 31 Desember 2025	15.406.532.329
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	3.319.478.132
Nilai Buku per 31 Desember 2025	12.087.054.197

Tabel C.10.2 Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Gedung dan Bangunan	15.406.532.329	15.395.612.329	10.920.000
Total	15.395.612.329	15.395.612.329	10.920.000

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi tambah pada akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.920.000. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penggunaan kembali aset lainnya berupa paving blok yang direklasifikasikan menjadi bagian dari aset Gedung dan Bangunan.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Gedung dan Bangunan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan nilai yaitu masing-masing sebesar Rp1.003.550.000 dan Rp1.003.550.000.

Tabel C.11.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.003.550.000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.003.550.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	297.323.158
Nilai Buku per 31 Desember 2025	706.226.842

Tabel C.11.2 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.003.550.000	1.003.550.000	0
Total	1.003.550.000	1.003.550.000	0

Tidak terdapat mutasi kurang atau mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp112.190.100.00 dan Rp112.190.100.00.

Tabel C.12.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya**(Dalam Rupiah)**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	112.190.100
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui	0
Saldo per 31 Desember 2024	112.190.100
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	112.190.100

Tabel C.12.2 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Aset Tetap Lainnya	112.190.100	112.190.100	0
Total	112.190.100	112.190.100	0

Tidak terdapat mutasi kurang atau mutasi tambah pada Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Aset Tetap Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.937.997.398 dan Rp11.272.064.244. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.14.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan(Rp)	Akm. Penyusutan(Rp)	Nilai Buku(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	8.454.553.208	8.321.196.108	133.357.100
2	Gedung dan Bangunan	15.406.532.329	3.319.478.132	12.087.054.197
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.003.550.000	297.323.158	706.226.842
Akumulasi Penyusutan		24.864.635.537	11.937.997.398	12.926.638.139

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

C.15. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel C.15.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Aset Tak Berwujud Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp104.618.000 dan Rp115.538.000. Penurunan Aset Lain-lain disebabkan oleh dilakukannya Penggunaan kembali reklasifikasi aset berupa paving blok senilai Rp10.920.000 ke dalam kelompok Aset Gedung dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali serta dalam proses penghapusan dari BMN. Sehingga nilai aset yang belum dilakukan usulan penghapusan menjadi sebesar Rp104.618.000.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Aset Lain-lain Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-66.222.416 dan Rp-68.827.861.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025.

Tabel C.17.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain	104.618.000	-66.222.416	38.395.584
Akumulasi Penyusutan				

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Kewajiban Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel C.4 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Kewajiban jangka pendek Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp 0.

Tabel C.18.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji PPNPN	0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
Total			0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.19. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Uang Muka Dari KPPN Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

C.20. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp176.210.320.326 dan Rp176.936.705.832. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Ekuitas Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BRMP Semester II Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional BRMP Seemester II Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	42.515.950	39.889.800
Beban Operasional	-9.250.436.386	-9.611.765.797
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	-9.207.920.436	-9.571.875.997

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Pada Kegiatan Operasional Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Semester II Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp42.515.950 dan Rp39.889.800. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.626.150 atau 6,584% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Pendapatan Operasional Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.455.950 dan Rp13.029.900. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1.1 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	42.515.950	39.889.800	6,584
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	-	0
Jumlah	42.515.950	39.889.800	6,584

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi merupakan pendapatan fungsional dari sewa guest house dan Rumah Dinas selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel D.1.2. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

TANGGAL SETOR	NILAI SETORAN	NOMOR NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN/ASAL TRANSAKSI
28/02/2025	300.000	D36B36U8F71F2VG9	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/05/2025	9.131.950	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
15/05/2025	900.000	6BE5D55DFIM7NEJO	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/06/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
13/06/2025	900.000	C7FEF61QVDBHNJMQ	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/07/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
04/07/2025	600.000	2642355DFIRS4T9R	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/08/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
11/08/2025	11.700.000	E85B22G5037TOFHS	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/09/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
10/10/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/11/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
03/11/2025	4.200.000	8C07A1JNG8U78AA5	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI
01/12/2025	2.112.000	Potong SPM/SP2D	425151	PENERIMAAN DARI GUEST HAUSE BRMP BALI

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.2 Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO(Rp)	LRA(Rp)	Selisih(Rp)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	42.515.950	42.515.950	0
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	-		0
Jumlah	42.515.950	42.515.950	0

Jika dilihat dari tabel diatas Nilai Pendapatan pada Laporan Operasional dengan Nilai Laporan Realisasi Pendapatan tidak memiliki selisih.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Semester II 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.250.436.386 dan Rp9.611.765.797. Nilai Beban Operasional Semester II Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp-361.329.411 atau 3,759% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Operasional Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.617.085.340 dan Rp5.786.847.904. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel D.2.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.819.273.480	4.011.582.000	-4,79
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.198	57.028	-13,73
Beban Tunj. Anak PNS	77.044.740	84.917.308	-9,27
Beban Tunj. Beras PNS	193.071.720	204.948.600	-5,80
Beban Tunj. Fungsional PNS	485.820.000	437.280.000	11,10
Beban Tunj. PPh PNS	46.229.254	47.899.218	-3,49
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	295.681.062	301.942.750	-2,07
Beban Tunjangan Umum PNS	71.505.000	92.225.000	-22,47
Beban Uang Lembur	80.275.000	75.453.000	6,39
Beban Uang Makan PNS	472.476.000	505.343.000	-6,50
Beban Gaji Pokok PPPK	32.302.966	-	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	694	-	100,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.589.576	-	100,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.035.830	-	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.445.000	-	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.486.420	-	100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Uang Makan PPPK	6.327.000	-	100,00
Jumlah	5.616.812.940	5.786.847.904	-2,93

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.819.273.480	3.819.273.480	0
Belanja/Beban Pembulatan Gaji PNS	49.198	49.198	0
Belanja/Beban Tunj. Anak PNS	77.044.740	77.044.740	0
Belanja/Beban Tunj. Beras PNS	193.071.720	193.071.720	0
Belanja/Beban Tunj. Fungsional PNS	485.820.000	485.820.000	0
Belanja/Beban Tunj. PPh PNS	46.229.254	46.229.254	0
Belanja/Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0
Belanja/Beban Tunj. Suami/Istri PNS	295.681.062	295.681.062	0
Belanja/Beban Tunjangan Umum PNS	71.505.000	71.505.000	0
Belanja/Beban Uang Lembur	80.275.000	80.275.000	0
Belanja/Beban Uang Makan PNS	472.476.000	472.476.000	0
Belanja/Beban Gaji Pokok PPPK	32.302.966	32.302.966	0
Belanja/Beban Pembulatan Gaji PPPK	694	694	0
Belanja/Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.589.576	2.589.576	0
Belanja/Beban Tunjangan Anak PPPK	1.035.830	1.035.830	0
Belanja/Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.445.000	5.445.000	0
Belanja/Beban Tunjangan Beras PPPK	2.486.420	2.486.420	0
Belanja/Beban Uang Makan PPPK	6.327.000	6.327.000	0
Jumlah	5.616.812.940	5.616.812.940	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih dari realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Pegawai Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp246.232.540 dan Rp 400.474.325. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.3.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	227.997.000	102.562.000	122,30
Beban Persediaan konsumsi	18.235.540	44.374.700	-58,91
Beban persediaan lainnya	0	253.537.625	-100,00
Jumlah	246.232.540	400.474.325	-38,51%

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO(Rp)	LRA(Rp)	Selisih(Rp)
Beban/belanja Persediaan bahan baku	227.997.000	0	227.997.000
Beban/belanja Persediaan konsumsi	18.235.540	12.236.540	5.999.000
Beban/belanja Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	246.232.540	12.236.540	233.996.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp233.996.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Tabel D.3.3 Rincian Selisih dari Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal	247.707.000
Belanja Persediaan dan Pemeliharaan Jaringan	21.063.150
Beban Persediaan Pemeliharaan	-34.774.150,00
Jumlah	233.996.000

Berdasarkan tabel diatas, kondisi tersebut disebabkan oleh saldo awal senilai Rp247.707.000 serta adanya belanja persediaan pemeliharaan jaringan Rp21.063.150 yang merupakan transaksi pembelian persediaan menggunakan akun 523136 dengan beban senilai Rp34.774.150.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Persediaan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.426.319.525 dan Rp1.530.312.121. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Bahan	454.828.310	374.581.115	21,42
Beban Barang Non Operasional Lainnya		258.804.000	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72.720.000	72.720.000	0,00
Beban Honor Output Kegiatan		7.920.000	-100,00
Beban Jasa Profesi	61.198.000	44.000.000	39,09
Beban Keperluan Perkantoran	535.144.020	546.033.350	-1,99
Beban Langganan Air	5.377.250	5.704.500	-5,74
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	85.326.177	85.629.295	-0,35
Beban Langganan Listrik	125.890.200	130.971.898	-3,88
Beban Langganan Telepon	764.568	2.808.963	-72,78
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.821.000	1.139.000	235,47
Beban Sewa	81.250.000	0	100,00
Jumlah	1.426.319.525	1.530.312.121	-6,80

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO(Rp)	LRA(Rp)	Selisih(Rp)
Beban Bahan	454.828.310	454.828.310	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya			0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72.720.000	72.720.000	0
Beban Honor Output Kegiatan			0
Beban Jasa Profesi	61.198.000	61.198.000	0
Beban Keperluan Perkantoran	535.144.020	535.144.020	0
Beban Langganan Air	5.377.250	5.377.250	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	85.326.177	85.326.177	0

Uraian	LO(Rp)	LRA(Rp)	Selisih(Rp)
Beban Langganan Listrik	125.890.200	125.890.200	0
Beban Langganan Telepon	764.568	764.568	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.821.000	3.821.000	0
Beban Sewa	81.250.000	81.250.000	0
Jumlah	1.426.319.525	1.426.319.525	0

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Nilai Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat selisih.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Barang dan Jasa Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah.

Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp776.744.109 dan Rp555.766.721. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5.1 Perbandingan Realisasi Belanja/Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407.371.275	205.943.300	97,81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334.598.684	334.584.321	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34.774.150	15.239.100	128,19
Beban Persediaan suku cadang	0	0	0,00
Jumlah	776.744.109	555.766.721	39,76

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LO(Rp)	LRA(Rp)	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407.371.275	407.371.275	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334.598.684	334.598.684	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34.774.150	21.063.150	13.711.000
Beban Persediaan suku cadang	0	0	0
Jumlah	776.744.109	763.033.109	13.711.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp13.711.000. Nilai ini merupakan selisih dari nilai yang seharusnya sub kelompok Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi namun tercatat di Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Jaringan sebesar Rp5.999.000 yang menyebabkan hasil akhir dari Belanja Pemeliharaan yang seharusnya Rp19.710.000 yang merupakan saldo awal persediaan untuk pemeliharaan di tahun anggaran 2025 yang di jadikan beban ditahun anggaran 2025 menjadi Rp13.711.000.

Tabel D.5.3 Rincian Selisih dari Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Saldo awal Persediaan untuk pemeliharaan jaringan	19.710.000
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan di LO	-34.774.150
Jumlah Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Semester 2 TA 2025	-15.064.150
Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan tercatat di LRA	21.063.150
Selisih Belanja Persediaan Konsumsi yang tercatat di Beban Persediaan Pemeliharaan Jaringan	5.999.000
Saldo awal Persediaan untuk pemeliharaan jaringan	-19.710.000
Selisih	-13.711.000

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Pemeliharaan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp517.939.163 dan Rp532.529.765. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6.1 Perbandingan Realisasi Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	428.119.163	391.134.225	9,46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.820.000	49.750.000	80,54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	91.645.540	-100,00
Jumlah	117.869.857	132.896.056	-11,31

Tabel D.6.2 Perbandingan Realisasi Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 LRA dan LO

Uraian	LO(Rp)	LRA(Rp)	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	428.119.163	428.119.163	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.820.000	89.820.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	117.869.857	117.869.857	0

Jika nilai Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat selisih.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Perjalanan Dinas Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.793.100 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.793.100, sedangkan pada 31 Desember 2024 tidak terdapat realisasi. Beban tersebut merupakan penyerahan barang kepada masyarakat berupa ayam DOC dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel D.7.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	3.793.100	-	100
Jumlah	3.793.100	-	100

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp332.871.206 dan Rp805.102.261. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp472.231.055 atau 58,65% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	455.442.889	455.332.357	0,02

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Irigasi	26.562.415	26.562.415	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.279.100	14.279.100	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.682.655	2.710.935	-37,93
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	165.360.650	306.217.454	-46,00
Jumlah	663.327.709	805.102.261	-17,61

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

D.9. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025(Rp)	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	185.000	439.587.030	(99,9)
Jumlah	185.000	211.590.030	(99,9)

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp185.000. Nilai ini merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yaitu pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji an. Rachmat Dharmawan.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp176.936.705.832 dan 177.391.960.667. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp455.254.835 atau 0,26% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Ekuitas Awal Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.207.735.436 dan Rp9.175.955.841. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp31.779.595 atau 0,35% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Surplus/Defisit – LO Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.150.893.427 dan Rp8.720.701.006 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel E.4.1 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.336.341.277
Diterima dari Entitas Lain	-189.240.950
Transfer Masuk	3.793.100
Jumlah	8.150.893.427

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Transaksi Antar Entitas Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 saldo DDEL adalah sebesar Rp189.240.950 sedangkan DKEL sebesar Rp8.336.341.277.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp175.879.863.823 dan Rp176.936.705.832. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.056.842.009 atau 0,6% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 2025.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal **tidak terdapat koreksi**, sehingga saldo Ekuitas Akhir Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah **tetap**.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapa Lain-lain

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali sampai dengan 31 Desember 2025 telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 12 (Dua Belas) kali yaitu :

1. Revisi Pertama tanggal 20 Pebruari 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
2. Revisi Kedua tanggal 25 Maret 2025 tentang Refocusing Anggaran – Penambahan Alokasi Anggaran Blokir Dalam Pagu Total Bertambah.
3. Revisi Ketiga tanggal 14 April 2025 tentang Pemutahiran RPD – Halaman III DIPA Triwulan II Dalam Hal Pagu Total Tetap.
4. Revisi Keempat tanggal 19 April 2025 tentang Pergeseran Alokasi Anggaran Belanja Gaji untuk Memenuhi Pagu Minus Belanja Gaji THR (14) dalam Hal Pagu Total Tetap.
5. Revisi Kelima tanggal 30 April 2025 tentang Pembukaan Alokasi Anggaran Blokir pada KRO (6918.AEA. 6918. EBA) dalam Hal Pagu Total Tetap.
6. Revisi Keenam tanggal 21 Mei 2025 tentang Pemutahiran POK Hal Alokasi Anggaran Belanja Pegawai PPPK beserta Pergeserannya dalam Hal Pagu Total Tetap.
7. Revisi Ketujuh tanggal 2 Juli 2025 tentang Pemuktahiran Halaman III Triwulan III dan Pergeseran Alokasi Anggaran Belanja Pegawai dan Kegiatan Program Strategis Kementan dalam Hal Pagu Total Tetap.
8. Revisi Kedelapan tanggal 2 September 2025 tentang Pengurangan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai dan Buka Anggaran Blokir Kegiatan Dukungan Manajemen dalam Hal Pagu Total Berkurang.
9. Revisi Kesembilan tanggal 19 September 2025 tentang Penambahan Alokasi Anggaran dan Buka Pagu Blokir (SD- PNP) Kegiatan Diseminasi Hasil SIP dalam Hal Pagu Total Bertambah.
10. Revisi Kesepuluh tanggal 11 Oktober 2025 tentang Penambahan Alokasi Anggaran Perjadin dan Perbaikan Jalan dan Draenase (dampak banjir) dalam Hal Pagu Total Bertambah.
11. Revisi Kesebelas tanggal 11 Nopember 2025 tentang Pemutahiran Data POK Perihal Relokasi Belanja Gaji PPPk Tahap II dan LDJ dalam Hal Pagu Total Tetap.
12. Revisi Keduabelas tanggal 19 Nopember 2025 tentang Realokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan Pergeseran Alokasi Anggaran Belanja LDJ Listrik dalam Hal Pagu Total Bertambah.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali selama Tahun 2025 telah melakukan Kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik di Bidang Pertanian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nomer Kontrak Pihak Pertama : 0955/B/HK/03/01/35/SP/2025 dan Nomer Kontrak Pihak Kedua : B-963/HK/230/H.12.17/07/2025 dengan jangka waktu 10 (Sepuluh) Bulan dari tanggal 26 Pebruari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan Nilai Kontrak Rp. 117.000.000, dimana sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi senilai Rp. 117.000.000,-. Adapun Lokasi Kerjasama ini berada di 2 (dua) Lokasi yaitu Subak Adeng, Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk komoditas Padi dan Kelompok Tani Pertiwi Wisesa, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk komoditas cabai.
2. Nomer Kontrak Pihak Pertama : 1434/B/HK.03.01/75/SP/2025 dan Nomer Kontrak Pihak Kedua : B-1526/HK/230/H.12.17/10/2025 dengan jangka waktu 7 (Tujuh) Bulan dari tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan Nilai Kontrak Rp. 133.790.000, dimana sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi senilai Rp. 133.790.000,-. Adapun Lokasi Kerjasama ini berada di 2 (dua) Lokasi yaitu Subak Jaka, Desa Kutuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk komoditas Padi dan Kelompok Tani Taru Lestari, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan untuk komoditas sayur.

Setelah dilaksanakan Audit BPK RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga saldo Rp175.879.863.823 Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah tetap.

F.3. Capaian Output

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga	: Kementerian Pertanian
Unit Organisasi	: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Satuan Kerja	: BRMP Bali
Fungsi	: Ekonomi
Sub Fungsi	: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
Program	: Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (EC); Dukungan Manajemen (WA)
Lokasi	: Bali

Kode	Kegiatan		Belanja			Keluaran				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian									
AEF.109	1.	Standar Instrumen Pertanian yang Diseminasikan	29.346.000	29.346.000	100	74	74	Orang	100	SD. PNP
	Subtotal		29.346.000	29.346.000	100					
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian									
AEA.101	1.	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan	1.175.000.000	688.344.947	58,58	1	1	Kegiatan	100	Pagu Efisiensi Blokir Rp.486.550.000,- (% Kinerja RO =99,98%)
EBA.956	2.	Layanan BMN	10.000.000	9.982.800	99,83	1	1	Layanan	100	SAL
EBA.958	3.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	8.300.000	5.140.000	61,93	1	1	Layanan	100	Pagu Efisiensi Blokir Rp.3.150.000,- (% Kinerja RO =99,81%)
EBA.962	4.	Layanan Umum	168.400.000	133.542.612	79,3	1	1	Layanan	100	Pagu Efisiensi Blokir Rp.34.190.000,- (% Kinerja RO =99,50%)
EBA.994	5.	Layanan Perkantoran	7.533.087.000	7.458.297.480	99,01	1	1	Layanan	100	SAL Belpeg dan LDJ
EBD.953	6.	Layanan Pemnatauan dan Evaluasi	18.300.000	12.699.244	69,39	1	1	Dokumen	100	Pagu Efisiensi Blokir Rp.5.600.000,- (% Kinerja RO =99,99%)
	Subtotal		8.913.087.000	8.308.007.083	93,21					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)		0	1.012.806						
	Total		8.942.433.000	8.337.353.083	93,23					



LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:29 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	42,515,950	39,889,800	2,626,150	6.584
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	42,515,950	39,889,800	2,626,150	6.584
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	42,515,950	39,889,800	2,626,150	6.584
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,616,812,940	5,786,847,904	(170,034,964)	(2.938)
Beban Persediaan	246,232,540	400,474,325	(154,241,785)	(38.515)
Beban Barang dan Jasa	1,426,319,525	1,530,312,121	(103,992,596)	(6.796)
Beban Pemeliharaan	776,744,109	555,766,721	220,977,388	39.761
Beban Perjalanan Dinas	517,939,163	532,529,765	(14,590,602)	(2.74)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3,793,100	0	3,793,100	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:29 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	663,327,709	805,102,261	(141,774,552)	(17.61)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(732,700)	732,700	(1,465,400)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,250,436,386	9,611,765,797	(361,329,411)	(3.759)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,207,920,436)	(9,571,875,997)	363,955,561	(3.802)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(43,666,874)	43,666,874	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	43,666,874	(43,666,874)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	439,587,030	(439,402,030)	(99.958)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	185,000	439,587,030	(439,402,030)	(99.958)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	185,000	395,920,156	(395,735,156)	(99.953)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,207,735,436)	(9,175,955,841)	(31,779,595)	0.346
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,207,735,436)	(9,175,955,841)	(31,779,595)	0.346

Keterangan :
FINAL

Denpasar, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:29 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	176,936,705,832	177,391,960,667	(455,254,835)	(0.26)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,207,735,436)	(9,175,955,841)	(31,779,595)	0.35
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,150,893,427	8,720,701,006	(569,807,579)	(6.53)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,056,842,009)	(455,254,835)	(601,587,174)	132.14
EKUITAS AKHIR	175,879,863,823	176,936,705,832	(1,056,842,009)	(0.6)

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. drh I Made Rai Yasa, MP

NIP 197209291999031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI 633982

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:30 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	40,200,000	189,240,950	149,040,950	471	27,000,000	104,939,830	(77,939,830)	389
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	40,200,000	189,240,950	149,040,950	471	27,000,000	104,939,830	(77,939,830)	389
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	40,200,000	189,240,950	149,040,950	471	27,000,000	104,939,830	(77,939,830)	389
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,942,433,000	8,336,341,277	(606,091,723)	93	9,271,639,000	8,825,640,836	445,998,164	95
1. Belanja Pegawai	5,674,875,000	5,616,812,940	(58,062,060)	99	5,838,588,000	5,786,847,904	51,740,096	99
2. Belanja Barang	3,267,558,000	2,719,528,337	(548,029,663)	83	3,433,051,000	3,038,792,932	394,258,068	89
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI 633982

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,942,433,000	8,336,341,277	(606,091,723)	93	9,271,639,000	8,825,640,836	445,998,164	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	146,540,000	(146,540,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(732,700)	732,700	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	145,807,300	(145,807,300)	(100.00)
Persediaan	0	247,707,000	(247,707,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	393,514,300	(393,514,300)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	162,802,640,000	162,802,640,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,454,553,208	8,454,553,208	0	0.00
Gedung dan Bangunan	15,406,532,329	15,395,612,329	10,920,000	0.07
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,003,550,000	1,003,550,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	112,190,100	112,190,100	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,937,997,398)	(11,272,064,244)	(665,933,154)	5.91
JUMLAH ASET TETAP	175,841,468,239	176,496,481,393	(655,013,154)	(0.37)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	104,618,000	115,538,000	(10,920,000)	(9.45)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(66,222,416)	(68,827,861)	2,605,445	(3.79)
JUMLAH ASET LAINNYA	38,395,584	46,710,139	(8,314,555)	(17.80)
JUMLAH ASET	175,879,863,823	176,936,705,832	(1,056,842,009)	(0.60)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	175,879,863,823	176,936,705,832	(1,056,842,009)	(0.60)
JUMLAH EKUITAS	175,879,863,823	176,936,705,832	(1,056,842,009)	(0.60)
JUMLAH EKUITAS	175,879,863,823	176,936,705,832	(1,056,842,009)	(0.60)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	175,879,863,823	176,936,705,832	(1,056,842,009)	(0.60)

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	162,802,640,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,454,553,208	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,406,532,329	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	142,791,000	0
0.0	134112	Irigasi	860,759,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	112,190,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,321,196,108
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,319,478,132
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	92,814,150
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	204,509,008
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	104,618,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	66,222,416
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,336,341,277
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	189,240,950	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,793,100
0.0	391111	Ekuitas	0	176,936,705,832
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	42,515,950
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,819,273,480	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	49,198	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	295,681,062	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	77,044,740	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	485,820,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	46,229,254	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	193,071,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	472,476,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	71,505,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	32,302,966	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	694	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,589,576	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,035,830	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,445,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,486,420	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	6,327,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	80,275,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	535,144,020	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:30 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,821,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72,720,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	454,828,310	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	125,890,200	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	764,568	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,377,250	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	85,326,177	0
3.0	522141	Beban Sewa	81,250,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	61,198,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407,371,275	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334,598,684	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	428,119,163	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,820,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	165,360,650	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	455,442,889	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14,279,100	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	26,562,415	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,682,655	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,235,540	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34,774,150	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3,793,100	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	227,997,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	732,700
JUMLAH			197,324,493,673	197,324,493,673

Keterangan :

FINAL

Denpasar, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranDr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	8,336,341,277
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	189,240,950	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	42,515,950
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	146,725,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,819,545,880	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49,604	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	295,681,062	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	77,044,740	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	485,820,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	46,229,254	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	193,071,720	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	472,476,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	72,245,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	32,302,966	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	694	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,589,576	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,035,830	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,445,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,486,420	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	6,327,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	80,275,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	535,144,020	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,821,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72,720,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	454,828,310	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,236,540	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	125,890,200	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	764,568	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	5,377,250	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	85,326,177	0
3.0	522141	Belanja Sewa	81,250,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	61,198,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407,371,275	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334,598,684	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	21,063,150	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	428,119,163	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,820,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (633982) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	272,400
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	406
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
JUMLAH			8,526,595,033	8,526,595,033

Keterangan :
FINAL

Denpasar, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
197209291999031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 633982
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,812,062,000	3,854,270,000	3,819,545,880	272,400	3,819,273,480	99.09	34,996,520
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70,000	70,000	49,604	406	49,198	70.28	20,802
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	288,327,000	298,150,000	295,681,062	0	295,681,062	99.17	2,468,938
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	84,999,000	77,335,000	77,044,740	0	77,044,740	99.62	290,260
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	467,740,000	486,260,000	485,820,000	0	485,820,000	99.91	440,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	53,454,000	49,204,000	46,229,254	0	46,229,254	93.95	2,974,746
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	217,972,000	194,172,000	193,071,720	0	193,071,720	99.43	1,100,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	662,112,000	484,371,000	472,476,000	0	472,476,000	97.54	11,895,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	80,692,000	73,542,000	72,245,000	740,000	71,505,000	97.23	2,037,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	5,692,628,000	5,542,574,000	5,487,363,260	1,012,806	5,486,350,454	98.99	56,223,546
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	32,606,000	32,302,966	0	32,302,966	99.07	303,034
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	694	0	694	13.88	4,306
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2,889,000	2,589,576	0	2,589,576	89.64	299,424
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,161,000	1,035,830	0	1,035,830	89.22	125,170
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	5,445,000	5,445,000	0	5,445,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	2,497,000	2,486,420	0	2,486,420	99.58	10,580
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	7,298,000	6,327,000	0	6,327,000	86.69	971,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	51,901,000	50,187,486	0	50,187,486	96.7	1,713,514
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	65,396,000	80,400,000	80,275,000	0	80,275,000	99.84	125,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	65,396,000	80,400,000	80,275,000	0	80,275,000	99.84	125,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,758,024,000	5,674,875,000	5,617,825,746	1,012,806	5,616,812,940	98.98	58,062,060
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	558,756,000	535,156,000	535,144,020	0	535,144,020	100	11,980
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,160,000	5,160,000	3,821,000	0	3,821,000	74.05	1,339,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72,720,000	72,720,000	72,720,000	0	72,720,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	636,636,000	613,036,000	611,685,020	0	611,685,020	99.78	1,350,980
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	296,130,000	454,903,000	454,828,310	0	454,828,310	99.98	74,690

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2200
SATUAN KERJA : 633982
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/26 2:31 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	296,130,000	454,903,000	454,828,310	0	454,828,310	99.98	74,690
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,673,000	18,823,000	12,236,540	0	12,236,540	65.01	6,586,460
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	12,673,000	18,823,000	12,236,540	0	12,236,540	65.01	6,586,460
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	156,000,000	133,800,000	125,890,200	0	125,890,200	94.09	7,909,800
522112	Belanja Langganan Telepon	3,600,000	3,600,000	764,568	0	764,568	21.24	2,835,432
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	6,000,000	5,377,250	0	5,377,250	89.62	622,750
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	87,805,000	90,205,000	85,326,177	0	85,326,177	94.59	4,878,823
522141	Belanja Sewa	0	81,250,000	81,250,000	0	81,250,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	32,400,000	61,200,000	61,198,000	0	61,198,000	100	2,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	285,805,000	376,055,000	359,806,195	0	359,806,195	95.68	16,248,805
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205,970,000	407,382,000	407,371,275	0	407,371,275	100	10,725
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334,713,000	334,713,000	334,598,684	0	334,598,684	99.97	114,316
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	21,076,000	21,076,000	21,063,150	0	21,063,150	99.94	12,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	561,759,000	763,171,000	763,033,109	0	763,033,109	99.98	137,891
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148,400,000	950,400,000	428,119,163	0	428,119,163	45.05	522,280,837
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,750,000	91,170,000	89,820,000	0	89,820,000	98.52	1,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	156,150,000	1,041,570,000	517,939,163	0	517,939,163	49.73	523,630,837
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,949,153,000	3,267,558,000	2,719,528,337	0	2,719,528,337	83.23	548,029,663
	JUMLAH BELANJA	7,707,177,000	8,942,433,000	8,337,354,083	1,012,806	8,336,341,277	93.22	606,091,723

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 **KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I : 09 **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 633982 **BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/05/26 2:32 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	40,200,000	42,515,950	0	42,515,950	105.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	40,200,000	42,515,950	0	42,515,950	105.76
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	146,725,000	0	146,725,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	146,725,000	0	146,725,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	40,200,000	189,240,950	0	189,240,950	470.75
	JUMLAH PENDAPATAN	40,200,000	189,240,950	0	189,240,950	470.75

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 2200

SATUAN KERJA : 633982

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALI

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

Tgl. Cetak 05/05/2026 2:32 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	146,540,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	732,700
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	19,710,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	227,997,000	0
0.0	131111	Tanah	162,802,640,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,454,553,208	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,395,612,329	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	142,791,000	0
0.0	134112	Irigasi	860,759,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	112,190,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,155,835,458
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,859,747,143
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	78,535,050
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	177,946,593
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,538,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	68,827,861
0.0	391111	Ekuitas	0	176,936,705,832
JUMLAH			188,278,330,637	188,278,330,637

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Provinsi/Kabupaten/Kot : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR

Satuan Kerja : (633982) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-018.09.2.633982/2025

Tahun Anggaran : 2025

KPPN : (037) Denpasar

Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	91.842.000,00
		(-)
3. Selisih	Rp	- 91.842.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00 karena Selisuh disebabkan penerimaan ADK Simponi/Potongan SPM Gaji
- 2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 91.842.000,00 karena Selisuh disebabkan penerimaan ADK Simponi/Potongan SPM Gaji

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

KOTA DENPASAR , 03 Januari 2026

Bendahara Penerimaan


NIROSEN TAMBUNAN
NIP 198612162011012016

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Desember 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	0,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	0,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0,00
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	91.842.000,00
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 91.842.000,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00 karena Selisuh disebabkan penerimaan ADK Simponi/Potongan SPM Gaji
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena Selisuh disebabkan penerimaan ADK Simponi/Potongan SPM Gaji

Bendahara Penerimaan



NIROSEN TAMBUNAN

NIP 198612162011012016

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. drh I Made Rai Yasa, MP

NIP 197209291999031001

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 633982 (BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI)**

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,



NIROSEN TAMBUNAN

NIP 198612162011012016

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 03-01-2026

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 03-01-2026 15:44



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198612162011012016 pada 03-01-
2026 15:44:24 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 03-01-2026

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	059A855DFJB3Q56L 00TL69341083	425911	IDR	10,410,000	ADA
2	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	0B83F48VVOOND343 00TL69339797	425911	IDR	16,340,000	ADA
3	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	377D07QLV328TBN0 121115125845	425911	IDR	1,000,000	ADA
4	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	381D13CIFU6ASC7G 121122125816	425911	IDR	500,000	ADA
5	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	4AC542G503JUJ5HB 00TL69341302	425911	IDR	10,410,000	ADA
6	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	4E55C48VVOOND1PP 00TL69339434	425911	IDR	16,340,000	ADA
7	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	65AD96U8F8FSGBV9 121129125828	425911	IDR	1,000,000	ADA
8	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	6CDE37QLV328TDNT 121067125742	425911	IDR	500,000	ADA
9	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	B983D48VVOOND38Q 00TL69340319	425911	IDR	10,410,000	ADA
10	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	BCC1948VVOOND5N2 00TL69341689	425911	IDR	10,910,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	C223255DFJB3MEJB	425911	IDR	500,000	ADA
					121030125654				
12	037	633982	2025-12-16	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	D5FF648VVOOND2MP	425911	IDR	10,410,000	ADA
					00TL69340747				
13	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	F38550NA0EF5LDT3	425911	IDR	500,000	ADA
					121052125724				
14	037	633982	2025-12-15	BENDAHARA PENERIMA BRMP BALI	F7F3E3CIFU6ASD57	425911	IDR	500,000	ADA
					121064125758				
TOTAL								89,730,000	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 198612162011012016 pada 03-01-2026 15:44:24 WIB.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR, P.O. BOX : 3480
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498
WEBSITE: bali.brmp.pertanian.go.id

Kepada Yth :
Kepala KPPN Denpasar
Gedung Keuangan Negara I
Jln. Dr. Kusuma Atmaja, Renon - Denpasar

Denpasar, 02 Januari 2026

SURAT PENGANTAR
Nomor :B- 100 /SP/KU.050/H.12.17/01/2026

NO	JENIS SURAT/BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ Bendahara) Bulan : Desember 2025	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan seperlunya
2	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan (LPJ Bendahara) Bulan : Desember 2025	1 (satu) set	



Kuasa Pengguna Anggaran,

Drdrh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP 197209291999031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-018.09.2.633982/2025

Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR KPPN : (037) Denpasar

Satuan Kerja : (633982) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00531/SSP/633982/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	61.600.000,00	558.704.835,00	620.304.835,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	61.600.000,00	558.704.835,00	620.304.835,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	61.600.000,00	251.965.185,00	313.565.185,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	1.600.000,00	4.300.000,00	5.900.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	6.665.185,00	6.665.185,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan		
1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00
III. Selisih Kas		
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

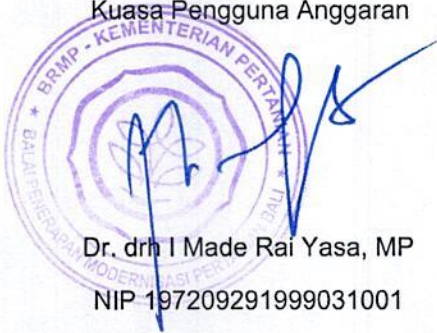
C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena -
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena -
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena -
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena -

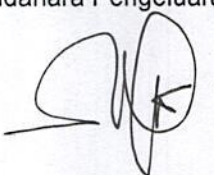
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP 197209291999031001

KOTA DENPASAR, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



I Putu Adi Purwanta, SE
197903132011011006

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 633982

Kode KPPN : 037

Nama Satker : BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN BALI

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
DENPASAR

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890596339821000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00531/SSP/633982/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

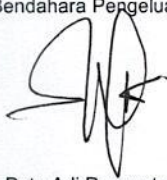
1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00 karena -
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena -
- C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)
0,00 karena -
- D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)
0,00 karena -

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



I Putu Adi Purwanta, SE
197903132011011006

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 197209291999031001

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 633982

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890596339821000	BPG 037 BALAI PSIP BALI	KC Padanan	20	001626	05-04-2021	2025-12-31	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



I Putu Adi Purwanta, SE

197903132011011006 197903132011011006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Propinsi / Kabupaten / Kota : (22.51) BALI / KOTA DENPASAR
Satuan Kerja : (633982) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI63398200-
No Rekening : 9890596339821000
Nama Rekening : BPG 037 BALAI PSIP BALI
Nama Bank : KC Padanan
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			61.439.650,00
03-12-2025	FPK-PENG-G4mtCjc6iaKUgW8	TUP	241.000.000,00	0,00	302.439.650,00
03-12-2025	FPK-PENG-BcBVn1rjju7WGCV	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	31.000.000,00	271.439.650,00
03-12-2025	FPK-PENG-OmgQFRwpFMXgOgJ	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	1.600.000,00	269.839.650,00
08-12-2025	FPK-PENG-bLf1axqGnHB07WM	LS perjadin	4.300.000,00	0,00	274.139.650,00
08-12-2025	FPK-PENG-AZXBCqJoPKIDEmY	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	110.000.000,00	164.139.650,00
08-12-2025	FPK-PENG-4m9SyW31DjqsidG	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	15.000.000,00	149.139.650,00
15-12-2025	FPK-PENG-p4M3cvsBNAzj2UP	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	13.839.650,00	135.300.000,00
15-12-2025	FPK-PENG-eEcWphOpDx3Hxdo	[DARI TUNAI] PU Bank (LS Perjadin)	0,00	4.300.000,00	131.000.000,00
18-12-2025	FPK-PENG-T7xkfcfLMpRoMBn	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	83.270.000,00	47.730.000,00

1	2	3	4	5	6
23-12-2025	FPK-PENG- uFq2p3JJ2K4dNVD	GUP NIHIL	0,00	0,00	47.730.000,00
29-12-2025	FPK-PENG- T0gX6YAU26XAZUq	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	47.730.000,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG- 61PCqHs15wWNdb8	PTUP belanja lembur PNS, uang makan PNS dan P3k Bulan Desember 2025	0,00	0,00	0,00
31-12-2025	FPK-PENG- taYBe7XTk4qD1m6	PTUP belanja barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah			245.300.000,00	306.739.650,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



I Putu Adi Purwanta, SE

197903132011011006 197903132011011006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



Mutasi Transaksi (01/12/2025 - 31/12/2025)

downloaded at 02/01/2026 08:06:

KEMENTERIAN PERTANIAN (018)									
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)									
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali (633982)									
Rekening Induk : RKK BALITBANG KEMENTAN OPS (989991416)									
Rekening Satker : BPG 037 BALAI PMP BALI (9890596339821000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-12-29	12:09:45	709343	TARIK TUNAI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI TT AN I PU	Rp. 47,730,000	Rp. 47,730,000	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2025-12-18	11:25:06	749163	TARIK TUNAI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI TT YBS AN	Rp. 131,000,000	Rp. 83,270,000	-	Rp. 47,730,000	(TELLER)	(Empty)
2025-12-15	09:42:40	254360	TARIK TUNAI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI TT AN ADI	Rp. 149,139,650	Rp. 18,139,650	-	Rp. 131,000,000	(TELLER)	(Empty)
2025-12-08	14:40:32	068763	TRANSFER DARI 0989991416 259991330455186000001 99133045518600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI	Rp. 144,839,650	-	Rp. 4,300,000	Rp. 149,139,650	(SPAN)	(Empty)
2025-12-08	10:24:54	319627	TARIK TUNAI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI TT AN I PU	Rp. 269,839,650	Rp. 125,000,000	-	Rp. 144,839,650	(TELLER)	(Empty)
2025-12-03	11:13:04	127437	TARIK TUNAI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI	Rp. 302,439,650	Rp. 32,600,000	-	Rp. 269,839,650	(TELLER)	(Empty)
2025-12-03	09:07:23	173714	TRANSFER DARI 0989991416 259991330444245000001 99133044424500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890596339821000 BPG 037 BALAI PMP BALI	Rp. 61,439,650	-	Rp. 241,000,000	Rp. 302,439,650	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 306,739,650	Rp. 245,300,000	Rp. 0		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Denpasar - 037

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI (633982)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	471FA6848SUI6TP2 930400113137	411618	IDR	20,000	ADA
2	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	723E25BMPBNKFR1 M 930421113144	411618	IDR	9,000	ADA
3	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	0C5A43IRPEBDPFSG 930456113153	411618	IDR	9,000	ADA
4	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	C5FBD2ME9KJ0LVE5 930476113201	411618	IDR	19,200	ADA
5	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	CED4A4F98QCURLR 5 930499113209	411618	IDR	19,200	ADA
6	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	747681Q00MOEH6TT 930524113218	411618	IDR	19,200	ADA
7	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	C409774HNUBRQBLK 930538113225	411618	IDR	10,900	ADA
8	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	F83603IRPPJUC5K2 930585113246	411618	IDR	17,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	3B1612ME9IK1JT6D 930596113253	411618	IDR	75,000	ADA
10	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	1711D2ME96O6R6LL 930628113312	411618	IDR	88,500	ADA
11	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	EEDAB4F974OORNA O 930644113324	411618	IDR	225,000	ADA
12	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	D2F064F971E4QP3B 930659113332	411211	IDR	299,279	ADA
13	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	758C674HN20GAGDB 930675113339	411618	IDR	60,000	ADA
14	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	579E874HNB33L3O3 930694113347	411618	IDR	60,000	ADA
15	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	A39955BMN0AUDO1 O 930713113355	411618	IDR	60,000	ADA
16	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	168FC2ME7V2O4LQC 930733113402	411618	IDR	60,000	ADA
17	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	7813C1Q0OPRJ6HAF 930764113413	411618	IDR	60,000	ADA
18	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	561A60TJA61T4JJN 930845113453	411618	IDR	60,000	ADA
19	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	06E20015QEMM129D 930850113501	411618	IDR	60,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	8FE02015NR08I1AE 930862113507	411618	IDR	60,000	ADA
21	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	E6B855BMOS4233UK 930881113513	411618	IDR	120,000	ADA
22	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	DA6252ME9TBEV40U 930892113519	411618	IDR	60,000	ADA
23	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	52DA54F98UF8IPJT 930907113526	411618	IDR	37,500	ADA
24	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	532426847U85Q532 930926113533	411618	IDR	38,000	ADA
25	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	1F3D86847LB9N658 930963113548	411618	IDR	36,000	ADA
26	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	5B0F3015O26F5MTB 930982113555	411618	IDR	18,000	ADA
27	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	C20F65BMOU90T732 930998113602	411618	IDR	18,000	ADA
28	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	4E7065BMNBMEJUO 8 931013113609	411618	IDR	18,000	ADA
29	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	8C9E074HKNKTE61BE 931091113626	411618	IDR	18,000	ADA
30	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	ECC933IROA45TRF7 931101113632	411618	IDR	36,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
31	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	295A43IRNMR7BAFR 931119113639	411618	IDR	18,000	ADA
32	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	DDE6C74HNM7HM25I 931136113647	411618	IDR	18,000	ADA
33	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	2F8D60TJ839JSAEJ 931197113700	411618	IDR	18,000	ADA
34	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	72CFB74HOHP0AADJ 931215113707	411618	IDR	18,000	ADA
35	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	8138768495Q6A8HJ 931243113714	411618	IDR	54,000	ADA
36	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	0BC605BMOTTLKQG B 931276113720	411618	IDR	10,000	ADA
37	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	6BCF41Q0NO0O6GM Q 931341113730	411618	IDR	54,414	ADA
38	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	1057D2ME8R1FB603 931363113736	411211	IDR	127,045	ADA
39	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	526FD1Q0Q2R5ARSP 931396113744	411211	IDR	239,324	ADA
40	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	57CE974HMEJQUOT Q 931417113751	411211	IDR	194,135	ADA
41	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	AA09D5BMPF1VTRTJ 931445113801	411618	IDR	793,874	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
42	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	0C0095BMOS6E668U 931524113812	411618	IDR	93,000	ADA
43	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	DE1FE1Q0OIAGQCM L 931542113820	411618	IDR	18,000	ADA
44	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	D3C725BMNFE1UQH 9 931560113828	411618	IDR	18,000	ADA
45	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	1B1DF3IRPGR0JM4K 931572113835	411618	IDR	18,000	ADA
46	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	2C13068472NUA1DQ 931591113844	411618	IDR	18,000	ADA
47	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	0BADD0TJA8NO4105 931665113929	411618	IDR	18,000	ADA
48	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	AD1BC2ME7FBO2IUG 931695113949	411618	IDR	43,514	ADA
49	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	6A4572ME9APOAEVR 931743114006	411618	IDR	144,900	ADA
50	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	48BBD0TJ98JK05CO 931767114014	411618	IDR	60,000	ADA
51	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	D661B015Q4SOHJFO 931793114022	411618	IDR	60,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
52	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	B359D0TJ97LKTI1F 931839114044	411618	IDR	112,350	ADA
53	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	2CFE86846NHD22LP 931851114056	411618	IDR	34,650	ADA
54	037	635905	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	59B1F4F99HDHT1G9 931864114106	411618	IDR	43,500	ADA
55	037	635905	31-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	162821Q0P26HG0HM 919035111126	411618	IDR	74,000	ADA
56	037	635905	31-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	7845B4F98S8QC3I2 919066111143	411618	IDR	2,491,950	ADA
57	037	635905	31-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	7968A4F99IGLBRMI 919112111215	411618	IDR	111,750	ADA
58	037	635905	31-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000260299903000	43D5B4F96URD59LU 919147111246	411618	IDR	70,000	ADA
TOTAL								6,665,185	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197903132011011006 pada 05-01-
2026 14:48:24 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Denpasar - 037

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi PNBP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI (633982)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	037	633982	22-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000000000000000	9EF597NASE1VM2NF 106892091935	815111	IDR	7,500	ADA
2	037	633982	30-Des-25	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI BADAN PE 0000000000000000	7B7F71GCDK4HQSS S 930354113125	815511	IDR	4,735,097	ADA
TOTAL								4,742,597	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197903132011011006 pada 05-01-
2026 14:48:24 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Denpasar - 037

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI (633982)

Cetak Tanggal 05-01-2026

Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197903132011011006 pada 05-01-
2026 14:48:24 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BALI
KPPN DENPASAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 633982 - BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 23/01/26 8:40

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,942,433,000	8,942,433,000	0
2	Belanja	8,337,354,083	8,337,354,083	0
3	Pengembalian Belanja	-1,012,806	-1,012,806	0
4	Estimasi Pendapatan	40,200,000	40,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	189,240,950	189,240,950	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

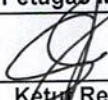
Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian		Disusun oleh/Tanggal	Ika Setiasih, S.P., M.Si 27/01/2026
Inspektorat Jenderal		Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Dr. Heni Nugraha, S.E., M.M. 27/01/2026
UAPA	018	Kementerian Pertanian	
UAPPA-E1	09	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	
UAKPA	633982	BRMP Bali	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
A Penyelenggaraan Akuntansi			
Telah dilakukan rekon dengan KPPN tanggal 22 Januari 2026 dan tidak ada selisih			
Tidak terdapat to do list			
B Penyajian LK:			
1. LRA			KKR LRA
Realisasi PNPB sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp189.240.950,00 atau sebesar 470,75% dari target senilai Rp40.200.000,00 diperoleh dari pendapatan penggunaan sarpras sesuai tusi dan pengembalian BPTAYL			
Realisasi belanja senilai Rp8.336.341.277,00 dari alokasi anggaran senilai Rp8.942.433.000,00 atau 93,22%			
2. LO			KKR LO
Beban persediaan pada LO senilai Rp246.232.540,00 sedangkan belanja barang persediaan senilai Rp12.236.540,00, atau terdapat selisih senilai Rp233.996.000,00 berupa pemakaian saldo awal persediaan senilai Rp247.707.000,00 serta adanya Belanja Persediaan Konsumsi yang tercatat di Beban Persediaan pemeliharaan senilai Rp(13.711.000,00)			
Beban pemeliharaan pada LO senilai Rp776.744.109,00 namun belanja pemeliharaan dalam LRA senilai Rp763.033.109,00 atau terdapat selisih senilai Rp13.711.000,00 karena adanya Belanja Persediaan Konsumsi yang tercatat di Beban Persediaan pemeliharaan			
Terdapat beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda senilai Rp3.793.100,00 namun tidak terdapat belanja 526, beban tersebut diperoleh dari penyerahan 600 ekor DOC kepada kelompok tani sesuai BAST			
3. LPE			KKR LPE
sesuai			
4. Neraca			KKR Neraca
Terdapat mutasi tambah GB senilai Rp10.920.000,00 berupa penggunaan kembali bangunan gedung tempat kerja lainnya karena setelah adanya Revaluasi Aset, Aset tersebut masih layak digunakan kembali.			
Aset lain-lain senilai Rp104.618.000,00 sudah dilakukan usulan penjualan dan hibah ke Eselon I BRMP			
Telah dilakukan PSP terhadap seluruh aset			
5. CaLK			KKR CaLK
CaLK telah disusun			
6. CaLBMN			KKR CaLBMN
CaLBMN telah disusun, namun terdapat koreksi pada nilai PSP aset			
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui			
1	Memantau proses usulan penjualan dan hibah aset lain-lain		
2	Memperbaiki nilai PSP aset dalam CaLBMN		
Pereviu		Petugas Modul GLP	
		 Putu Yosi Priningsih HP: 08123663733	
Ika Setiasih		Petugas Modul Aset	
		 Ketut Resiana, SP HP: 081999372688	

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (633982) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali

Kode dan Nama UAPPAW : (2200) Bali

Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kode dan Nama K/L : (018) Kementerian Pertanian

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	v	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	v	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	v	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	v	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	v	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	v	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	v	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	v	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	v	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		v
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		v
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		v
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		v
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		v
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		v
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		v
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		v
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		v
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v
a.	Pagu/DIPA		

	b. Estimasi PNBP			Tidak
	c. Belanja			Tidak
	d. Pengembangan Belanja			Tidak
	e. Pendapatan			Tidak
	f. Pengembangan Belanja			Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran			Tidak
	i. Kas Hibah			Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak

2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	v		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	v		Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	v		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL

	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		v	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak

Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas

		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		v	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		v	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		v	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		v	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		v	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya

7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang"

1. Saldo awal telah sesuai
2. Tidak terdapat selisih internal
3. Data Capaian Output agar diungkapkan pada CaLK di Pos Pengungkapan Penting Lainnya

Mengetahui
Pejabat Penyusun LK



(Putu Yosi Priningsih)
NIP. 19730605 200701 2 001

Jakarta, 26 Januari 2026
Penelaah,



(Astri N. Istiana)
NIP 199507182018012001